

MODEL STRATEGI PEMBELAJARAN BUDI PEKERTI DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Parji

Jurusan PMP-KN, FPIPS IKIP PGRI Madiun, Jl. Setiabudi No.85 Madiun Telp. 0351 462986

Abstract: The study tries to identify the difficulties and weaknesses surfacing in moral education and assess the need for and the possibility of the implementation of constructivist teaching approaches in moral education. Using a qualitative design, specifically, grounded theory, data were collected through observations, in-depth interviews, and focused group discussions from the subjects which were selected using snow-ball technique within the setting of Madiun Municipality. The data were analyzed using an interactive data analysis model. The results show that there have been serious weaknesses and difficulties in moral education brought about by internal and external factors. While the former includes those residing in the teachers (e.g., lack of innovations), school system and facilities, curriculum, and teaching-learning process, the latter encompasses such factors as limited support from the (local) government, school committee, and students' parents, and the socio-culture of the society. This study also reveals the need for the implementation of alternative instructional strategies. In this regard, the study proposes the use of constructivist paradigm in moral education.

Kata kunci: pendekatan konstruktivistik, pendidikan kepribadian, pendidikan moral.

Pendidikan budi pekerti bertujuan agar siswa mampu memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat (Depdiknas, 2003a). Artinya pendidikan budi pekerti diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengembangkan karakter bangsa (*nation character building*) yang lebih beradab. Melihat pentingnya peran pendidikan budi pekerti yang strategis dalam pembentukan bangsa yang beradab maka dalam kurikulum diputuskan bahwa pendidikan budi pekerti merupakan bagian integral dari semua mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan di sekolah, termasuk dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Depdiknas, 2003b). Namun dalam perjalanan bangsa sampai saat ini, kondisi tersebut belum terwujud. Menurut Parji (2002) Pendidikan budi pekerti yang berjalan sampai saat ini ditengarai berbagai pihak belum berhasil dalam mewujudkan fungsinya, yaitu pembentukan karakter bangsa yang beradab. Hal ini tampak pada maraknya peristiwa kerusuhan, terorisme, pembunuhan, perampokan dan peristiwa asusila lainnya.

Berbagai pihak juga menengarai bahwa kegagalan pendidikan budi pekerti yang terjadi sampai saat ini dikarenakan pendidikan budi pekerti hanya

menekankan pada aspek kognitif saja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan budi pekerti belum relevan dengan dinamika psikologis perilaku normal. Bandura (2002) menjelaskan bahwa perilaku moral pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi menurut Piaget, resiprokalitas dari aspek kognitif, afektif, dan pengaruh sosial. Di awal perkembangannya individu belajar norma dan nilai-nilai moral dari masyarakat melalui berbagai proses interaksi dengan orang lain. Individu belajar norma dan nilai moral dari proses pengasuhan orang tuanya, bermain dengan teman sebayanya, bergaul dengan keluarga dan saudaranya dan lain-lain. Berdasarkan interaksi tersebut secara berkesinambungan individu mengembangkan penilaian moral (*moral judgement*) (dalam Michener & DeLamater, 1999).

Penilaian moral terkait dengan dua hal, yakni a) alasan bagi individu untuk mengikuti aturan moral tertentu, dan b) dasar bagi individu untuk mengevaluasi tindakannya sendiri atau tindakan orang lain berdasarkan kriteria baik dan buruk (Durkin, 1995; Michener & DeLamater, 1999). Ketika seseorang membuat penilaian moral bahwa jujur adalah tindakan yang baik, maka pada dasarnya dia memiliki alasan mengapa jujur merupakan tindakan yang baik

dan berdasarkan nilai kejujuran yang dikembangkannya dia mampu untuk menilai perilaku dirinya sendiri maupun orang lain dari segi kejujuran.

Khusus mengenai alasan individu mengikuti aturan moral tertentu, ini berkaitan dengan penalaran moral (*moral reasoning*). Kohlberg (dalam Elliot, dkk, 1999; McCown, Driscoll & Roop, 1996; Omrod, 2003) secara detail menjelaskan bahwa alasan moral pada individu memiliki pola perkembangan tertentu sesuai dengan perkembangan usia. Pola perkembangan penalaran moral dimulai dari tahap prokonvensional (dari lahir sampai 9 tahun), tahap konvensional tertentu (dari 9 tahun sampai remaja), dan tahap pasca konvensional (pada masa dewasa dan seterusnya). Pada prekonvensional, individu belum mengenal konvensi aturan sosial di masyarakat. Penalaran moral yang berkembang di masa ini dibagi atas tahap hukuman dan orientasi untuk patuh kepada orang dewasa serta berorientasi pada pembalasan. Pada tahap konvensional, penalaran moral berkembang atas dasar konvensi aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Penalaran moral yang berkembang pada tahap ini dibagi atas orientasi konformitas interpersonal dan orientasi patuh pada hukum yang berlaku. Pada tahap akhir, yakni pascakonvensional, penalaran moral individu diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang saling menguntungkan dan penerapan prinsip yang konsisten dalam membuat penilaian. Penalaran moral yang berkembang di tahap ini dibagi atas tahap pengutamaan hak asasi dan orientasi pada kontrak sosial dan pada tahap orientasi penerapan prinsip etika yang universal.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, individu yang telah mengembangkan moral tertentu tidak secara otomatis akan menerapkan penilaian moral. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan penilai moral dalam tindakan mengikuti pola mekanisme regulasi diri (Bandura, 2001). Penilaian moral dalam proses regulasi diri merupakan standar moral (*moral standard*) bagi individu. Proses regulasi diri dalam menerapkan standar moral dilakukan dengan diawali dari pemantauan kondisi mana standar moral tersebut dapat diterapkan, kemudian diikuti proses regulasi untuk menerapkan standar moral tersebut dalam bentuk runtutan tindakan yang dilakukannya. Penerapan standar moral ini memberikan individu peranan berharga (*self worth*), tetapi apabila melanggar standar moral yang dikembangkannya maka dia akan mengembangkan sanksi bagi dirinya (*self sanction*) (Bandura, 2002). Sanksi pribadi (*self sanction*) berkembang selaras dengan perkembangan standar moral.

Regulasi diri dalam moralitas bukan serta merta ditentukan oleh faktor dalam diri (*self*) saja, melain-

kan hasil resiprokalitas antara faktor kognitif, afektif dan pengaruh sosial (Bandura, 2002). Proses regulasi diri moralitas itu sendiri tidak terjadi apabila tidak diaktivasi oleh individu, sehingga dalam kondisi tersebut individu melanggar standar moral yang dikembangkannya. Terdapat banyak manuver sosial-psikologis yang memungkinkan individu melanggar standar moral yang telah dikembangkan. Berbagai manuver sosial psikologis tersebut meliputi justifikasi moral (*moral justification*), perbandingan dengan sesuatu yang lebih rendah (*palliative comparison*), pelabelan eupimistik (*euphemistic labeling*) dan berbagai manuver yang lainnya (Bandura, 2002).

Pemahaman mengenai dinamika psikologis dari perilaku moral memberikan pedoman bagi pembinaan dan pendidikan budi pekerti. Parji (2002) menggariskan bahwa pendidikan budi pekerti semestinya berusaha untuk menggunakan pengetahuan moral secara bermakna, menghargai pandangan dan keyakinan peserta didik, dan melakukan aktivitas belajar dalam konteks nyata dalam mempelajari nilai budi pekerti, tidak sekedar bersifat normatif dan indoktrinasi.

Pendidikan budi pekerti sangat terkait dengan pengembangan kecakapan personal dan sosial (Depdiknas, 2002). Oleh karena itu, pendidikan budi pekerti perlu disusun guna memberikan bekal kepada siswa untuk menguasai kecakapan personal dan sosial. Individu yang memiliki kecakapan personal dan sosial diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budi pekerti luhur yang berlaku di masyarakat dan menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global saat ini.

Dalam rangka memenuhi tuntutan keterampilan pribadi dan sosial dalam pendidikan berbasis kompetensi; mengembangkan aspek kognitif, afektif dan pengaruh sosial dalam pendidikan budi pekerti; dan membuat pendidikan budi pekerti bernuansa nilai budi pekerti yang luhur yang bermakna maka diperlukan pendekatan pendidikan budi pekerti berbasis pendekatan konstruktivisme. Pendidikan budi pekerti berbasis pendekatan konstruktivisme dilaksanakan berdasarkan pandangan bahwa peserta didik pada awal pendidikan memiliki serangkaian konsep atau keyakinan nilai, yang umumnya berupa miskonsepsi yang diperlukan untuk direkonstruksi (Abdal-Haqq, 1998; Bransford, Brown & Cocking, 1999; Butler, 1998; & Mestre, 2002). Siswa dengan miskonsepsinya diberi motivasi untuk mengubah miskonsepsinya dan guru pada tahap terakhir kegiatan membimbing siswa merekonstruksi keyakinan nilai siswa. Proses perekonstruksian keyakinan dilaksanakan melalui proses inkuiri, bertanya, berkolaborasi, mengamati, bereksperimen, merefleksi, meniru

model, dan menerapkan dalam lingkungan nyata (Fenwick, 2001; Parji, 2002).

Di sisi lain, mata pelajaran PKn di sekolah merupakan mata pelajaran pengembangan ideologi negara dan kesadaran masyarakat dalam berbangsa. Namun, mata pelajaran ini belum memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan budi pekerti siswa. Banyak siswa yang memiliki nilai PKn yang tinggi, tetapi tindakan dan perilakunya belum mencerminkan nilai-nilai dari ideologi Pancasila (Parji, 2002). Adanya kenyataan bahwa kelulusan hanya ditentukan oleh tiga mata pelajaran dan PKn tidak termasuk di dalamnya, membuat siswa semakin kurang tertantang untuk mempelajari PKn secara serius.

Berdasarkan latar masalah di atas ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan jawaban: (1) mengapa strategi pembelajaran budi pekerti yang berjalan selama ini belum mampu memperkuat proses internalisasi pada peserta didik, (2) bagaimana pandangan *stake holder value* (birokrat, Kepala sekolah, guru, peserta didik) terhadap strategi pembelajaran budi pekerti yang berjalan saat ini, (3) seberapa penting model alternatif strategi pembelajaran budi pekerti dengan pendekatan konstruktivistik di SMP.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mengadakan inventarisasi tentang kesulitan dan kelemahan strategi pembelajaran pendidikan budi pekerti yang berjalan selama ini, dan (2) mengetahui penggunaan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran budi pekerti.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penyusunan teori dari bawah (*grounded theory*) (Moleong, 2005). Berdasarkan pendekatan ini maka penelitian ini diarahkan untuk memahami kebutuhan berbagai pihak yang terkait langsung dengan pendidikan budi pekerti. Dengan demikian diharapkan diperoleh pokok-pokok implikatif dan generalisasi pendekatan konstruktivistik dalam strategi pembelajaran budi pekerti yang diintegrasikan dalam mata pelajaran PKn.

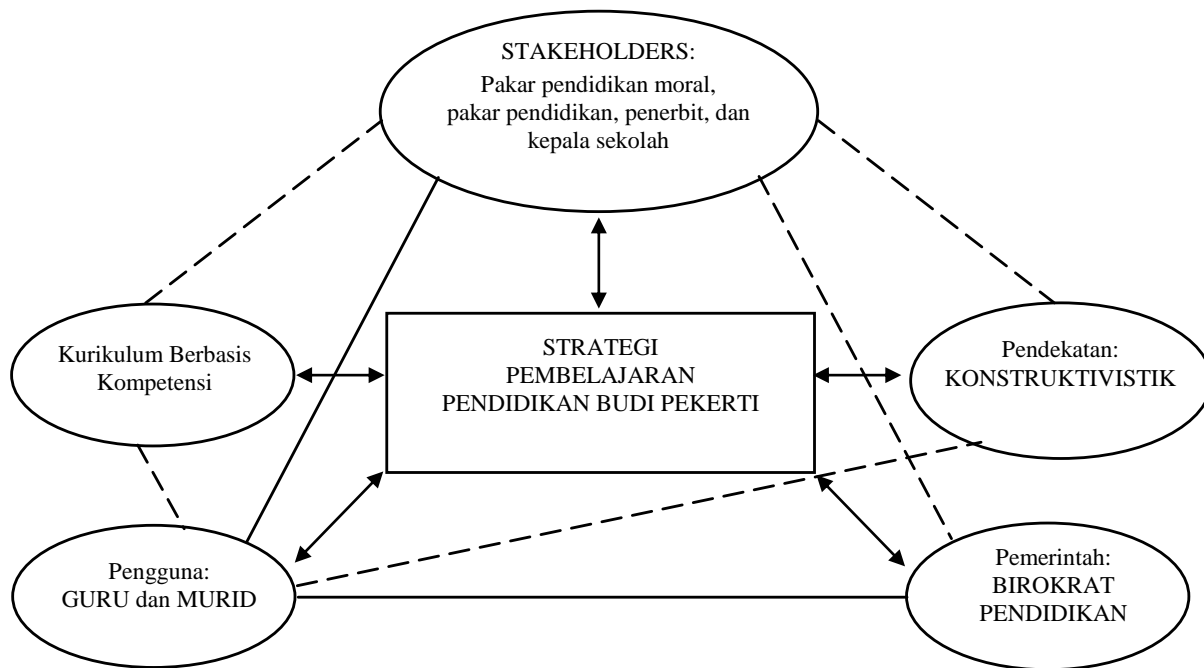
Lingkup penelitian ini adalah berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan budi pekerti (lihat Gambar 1). Sesuai dengan latar penelitian, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel yang diperkirakan representatif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan budi pekerti (Gambar 1). Guna memperdalam

pemerolehan data, digunakan teknik pengambilan sampel *snowball sampling*. Keseluruhan sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah: (1) kelompok pengguna, terdiri atas 200 siswa yang berasal dari 4 SMP di Kota Madiun dan 48 guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berasal dari 14 SMP di Kota Madiun, (2) kelompok pemerintah, terdiri atas dua orang pengawas SMP dan tiga orang perwakilan pejabat Dinas Pendidikan Nasional Kota Madiun, dan (3) kelompok *stake holder* dapat dirinci sebagai berikut: (a) 1 orang pakar pendidikan moral dari Madiun, (b) 3 orang dari lembaga penerbitan buku pegangan mata pelajaran PKn, dan (c) 4 Kepala SMP di Kota Madiun.

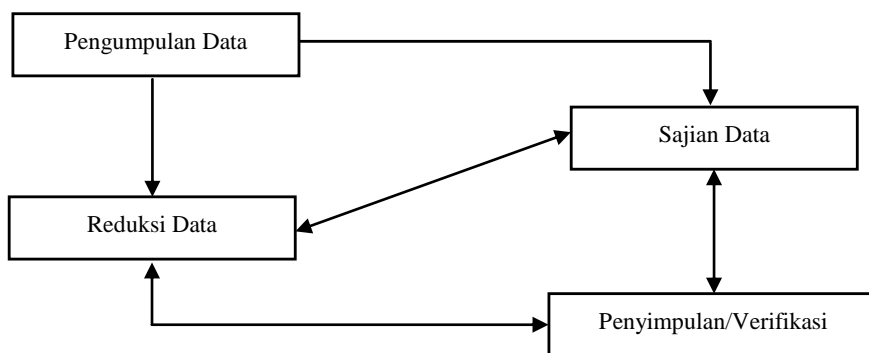
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik. *Pertama*, *focused group discussion* dilaksanakan selama tiga kali kepada guru, kepala sekolah, penerbit, pengawas sekolah, dan pejabat Dinas Pendidikan Nasional Kota Madiun guna memahami kebutuhan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan pengintegrasian nilai-nilai budi pekerti di dalamnya melalui teknik *focuses group discussion* diperoleh data tentang harapan dan penilaian mereka mengenai pendidikan budi pekerti khususnya yang terintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Kedua, wawancara mendalam (*in depth interview*) dilaksanakan kepada ahli untuk menggali pendapat ahli pendidikan dan ahli pendidikan moral mengenai penyelenggaraan pendidikan budi pekerti di sekolah dalam perspektif pendekatan konstruktivistik, khususnya bila diintegrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan. Wawancara kepada siswa untuk memahami pandangan mereka tentang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, perilaku budi pekerti, dan kebutuhan atau kekurangan siswa dalam pembelajaran budi pekerti. *Ketiga*, angket ditujukan kepada siswa dalam rangka melengkapi dan memperkaya data siswa yang telah diperoleh dengan teknik wawancara.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Koentjoro, 2001), yang meliputi tahap-tahap: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, yaitu mereduksi (membuang) data-data yang dirasa tidak relevan untuk kepentingan penyusunan model strategi pembelajaran pendidikan budi pekerti, (3) penyajian (*display*) data, berupa klasifikasi, penampihan, uraian, pembagian, dan sebagainya, dan (4) penyimpulan atau verifikasi. Jika divisualisasikan maka tahap tersebut dapat ditampilkan dalam Gambar 2.



Gambar 1. Latar Penelitian



Gambar 2. Model Analisis Interaktif

HASIL

Pandangan tentang Pendidikan Budi Pekerti di SMP

Hasil analisis data tentang Pendidikan Budi Pekerti di SLTP, dapat dilihat dari pandangan guru, kepala sekolah, maupun pengawas SMP, yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, penciptaan iklim (kondisi belajar) di sekolah maupun proses evaluasi baik di dalam kelas maupun evaluasi sekolah secara berkala.

Pandangan guru tentang keberhasilan pendidikan budi pekerti di sekolah menunjukkan apresiasi yang relatif sama, yaitu bahwa pendidikan budi pekerti mengalami kegagalan. Pandangan para guru ini didasarkan pada pengamatan tentang perilaku siswa di sekolah baik yang menyangkut sopan santun, kedisiplinan, maupun tanggung jawab siswa.

Pandangan guru ini ternyata diperkuat oleh angket perilaku siswa, terutama yang menyangkut tata krama dan sopan santun; 53% siswa mengaku pernah melakukan tindakan usil yang merugikan orang lain, dan 14% siswa mengaku sering melakukannya. Dalam hal berbuat kesalahan, 10% siswa mengaku sering ditegur guru, sementara 73% mengaku pernah di tegur oleh guru, dan hanya 15% yang mengaku tidak pernah mendapat teguran. Yang lebih mencengangkan 72% siswa mengaku pernah *misuh* (mengumpat) dan 6% siswa mengaku *misuh*, hanya 23% siswa mengaku tidak pernah misuh.

Sedangkan kepala sekolah, hampir semua mengatakan bahwa budi pekerti di sekolah masih memprihatinkan. Pendapat ini lebih didasarkan pada perilaku disiplin siswa dalam mematuhi tata tertib di sekolah maupun sopan santun terhadap guru maupun kepala sekolah. Pendapat kepala sekolah di

perkuat oleh pengakuan siswa, bahwa ada 14% siswa yang mengaku jarang mentaati peraturan sekolah. Sementara 32% siswa mengaku kadang-kadang mentaati peraturan sekolah. Dalam hal Wiyata Mandala, hanya 7% siswa yang mengaku masih ingat, sementara 43% mengaku sudah lupa, dan sisanya ingat tetapi hanya sebagian.

Stake holders yang lain, termasuk pengawas SMP mempunyai pandangan yang tidak berbeda dengan para guru maupun kepala sekolah. Mereka sepakat bahwa pendidikan budi pekerti belum berhasil dan mengalami kegagalan. Umumnya pendapat para pengawas lebih didasarkan pada fenomena-fenomena sosial seperti banyak siswa yang *keluyuran* pada jam-jam masuk sekolah, maupun banyaknya siswa yang terlibat tawuran pelajar, narkoba, perilaku seks bebas maupun bentuk-bentuk kegagalan remaja lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Pendidikan Budi Pekerti di SMP

Pendidikan sebagai sistem, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Pendidikan budi pekerti di sekolah tingkat keberhasilannya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat maupun pendukungnya. Dalam penelitian ini secara umum di temukan faktor-faktor penghambat pendidikan budi pekerti yang dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu (1) faktor internal yang meliputi faktor penghambat yang berasal dari guru, sistem sekolah, kurikulum, sistem pembelajaran serta fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, dan (2) faktor eksternal yang berasal dari dukungan pemerintah, sosial budaya masyarakat, dukungan komite sekolah, dan dukungan keluarga (orang tua) yang masih belum maksimal.

Faktor penghambat dari guru meliputi banyak guru yang tejabak pada tugas mengajar sebagai rutinitas sehingga kurang peduli pada budi pekerti dan penanaman nilai-nilai kepada siswa. Cara mengajar guru masih banyak yang konvensional, kurang inovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Sebagian besar metode yang digunakan guru dalam mengajarkan pendidikan budi pekerti terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya mengandalkan strategi ceramah atau ekspositori. Keterlibatan siswa secara aktif sangat kurang, kecuali hanya diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan tertutup dan itupun dilakukan secara bersama-sama satu kelas.

Di samping itu, guru masih banyak yang berpandangan yang keliru mengenai pembelajaran budi pekerti, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. Guru masih banyak yang beranggapan bahwa tugas mereka adalah untuk menuntaskan materi pelajaran yang menjadi beban pokok bahasannya; yang penting materi tuntas, tidak peduli siswa memahami nilai budi pekerti atau tidak (FGD 2, 14-19).

Faktor sistem sekolah, mengarah pada banyak sekolah yang belum membuat terobosan sistem sekolah yang bisa mewadahi aplikasi nilai-nilai budi pekerti terpadu. Sekolah sebenarnya bila merancang bentuk-bentuk kegiatan yang inovatif dalam memotivasi dan memfasilitasi pembiasaan nilai-nilai yang baik misalnya lewat MOS atau kegiatan sekolah yang lain. Apalagi dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) maka peluang sekolah untuk berkreasi menjadi lebih terbuka.

Faktor kurikulum juga sangat berpengaruh dan dominan dalam mempengaruhi keberhasilan pendidikan budi pekerti. Diintegrasikannya muatan budi pekerti pada semua mata pelajaran tanpa sosialisasi dan format yang jelas menjadikan kendala yang sangat serius dalam pendidikan budi pekerti. Dalam hal ini ada kesulitannya dalam menerjemahkan isi kurikulum dan memasukkan unsur budi pekerti ke dalamnya. Para guru sangat mengharapkan adanya semacam model atau modul tentang cara-cara menambah nilai-nilai budi pekerti kepada siswa. Mata pelajaran PKn sendiri yang sementara ini dianggap mewadahi pendidikan budi pekerti, kenyataannya materi lebih berorientasi pada demokrasi, HAM, dan tata negara.

Faktor sistem pembelajaran nampak pada cara mengajar guru yang masih bersifat sangat normatif. Banyak guru yang masih menggunakan cara-cara mengajar yang konvensional dan tidak dikonfrontasikan dengan realitas-realitas sosial yang mestinya lebih menonjol. Padahal cara-cara mengajar yang variatif dan efektif sangat diharapkan dan bisa jadi efektif dalam membawa peserta didik pada proses pemahaman dan internalisasi nilai lebih baik. Hasil angket menyatakan bahwa siswa menghendaki penyampaian guru lebih bervariasi 74% dan media dibuat lebih menarik 23%. Siswa juga berpendapat bahwa pelajaran PKn menjadi membosankan karena metode yang digunakan guru (42%), materi tidak menarik (34%) dan 22% siswa menyatakan karena kurangnya media. Tentang materi yang tidak menarik itu terungkap bahwa 53% guru masih mengandalkan buku paket saja, sementara 40% sudah memadukan dengan sumber lain seperti majalah, koran, berita TV dan lain-lain, sedangkan sisanya menggunakan buku paket dan koran/majalah.

Faktor fasilitas mengarah pada tertatanya media yang ada di sekolah. Kecil sekali guru memanfaatkan

kan media CD atau film, bahkan pemanfaatan OHP saja masih sangat terbatas. Rata-rata masih menggunakan media gambar yang tentu saja relevansinya untuk tingkat SMP perlu dipertanyakan. Sebenarnya guru dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada di luar sekolah atau lingkungan sekitar. Namun demikian tampaknya masih sangat jarang yang melakukannya.

Faktor penghambat eksternal, dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktor dukungan pemerintah lebih mengarah pada regulasi aturan terutama yang menyangkut penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak sangat tidak mendukung upaya penanaman nilai budi pekerti. Banyaknya tayangan percintaan, kriminalitas dan kekerasan sangat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja. Dari hasil angket diketahui bahwa tayangan TV yang paling digemari dan dilihat siswa ialah percintaan (57%) sedangkan sisanya 43% tersebar pada beberapa acara seperti drama keluarga, tayangan religi, dan olahraga. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam menata tayangan televisi. Badan Sensor Film (BSF) seharusnya benar-benar difungsikan.

Faktor komite sekolah dan orang tua juga perlu mendapat perhatian. Selama ini peran komite masih sangat terbatas. Komite perlu memberikan kontribusi pemikiran pada sekolah agar upaya-upaya pendidikan budi pekerti yang lebih baik bisa diupayakan secara terpadu. Dukungan keluarga (orang tua) juga sangat penting. Ketergantungan mendidik anak pada sekolah perlu ditinggalkan. Apa yang dilakukan guru di sekolah tidak akan banyak berarti tanpa dukungan orang tua.

Deskripsi Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti di SMP

Masalah-masalah strategi pembelajaran pendidikan budi pekerti di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dilihat dari (1) kemampuan guru dalam menjabarkan isi kurikulum ke bahan ajar, (2) ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar, (3) model interaksi guru-siswa, (4) pemanfaatan potensi alam sekitar, (5) kesulitan siswa dalam memahami isi pelajaran, (6) kesulitan guru dalam penyampaian isi, dan (7) media yang ada di sekolah.

Kemampuan guru dalam menjabarkan isi kurikulum ke bahan ajar masih terlihat kurang percaya diri dari para guru. Pembelajaran dalam KBK yang semestinya menuntut keberanian guru dalam menterjemahkan kurikulum di lapangan masih belum sesuai harapan. Para guru masih terjebak pada ru-

tinitas yang kaku, sehingga dalam pembelajaran juga terlihat monoton.

Ketersediaan sumber belajar menjadi problem serius para guru dan siswa ketika harus menambah nilai-nilai budi pekerti. Tidak adanya model pembelajaran tentang budi pekerti yang komprehensif menjadi hal yang mempengaruhi kualitas pembelajarannya. Guru juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan isi pembelajaran secara komunikatif.

Model interaksi guru-siswa memang sudah relatif berkembang dan menempatkan siswa sebagai subjek. Namun demikian, metode ceramah masih menjadi metode utama, sementara pembelajaran yang lebih bermakna secara kontekstual masih belum nampak. Sementara model interaksi masih cenderung monoton, pemanfaatan potensi alam sekitar juga tidak banyak dilakukan. Padahal banyak sekali latar dan realitas sosial yang dapat dijadikan sumber belajar. Misalnya ketika berbicara kemiskinan, siswa bisa diajak ke panti-panti asuhan atau melihat gelandangan dan pengemis yang fenomenanya sangat mudah dijumpai.

Dari hasil wawancara secara mendalam terungkap bahwa siswa cenderung bosan ketika mengikuti pembelajaran PKn, artinya ada kesulitan dalam hal internalisasi nilai. Hal ini juga sejalan dengan keluhan para guru akan kesulitan yang dihadapi ketika mengajarkan masalah budi pekerti. Kesulitan ini salah satunya karena belum adanya model strategi pembelajaran yang dianggap representatif. Dari wawancara dan FGD terekam dan terlihat sekali antusiasme pada guru ketika berdialog tentang perlunya model pembelajaran pendidikan budi pekerti, karena memang sangat dibutuhkan.

Hal penting lain yang bisa dilihat dari strategi pembelajaran pendidikan budi pekerti di SMP ialah terbatasnya media pembelajaran yang benar-benar representatif. VCD tidak banyak tersedia bahkan jarang sekali ada di sekolah. OHP juga sangat terbatas, sementara laboratorium sekolah masih terbatas hanya meliputi kegiatan yang berbasis IPA.

PEMBAHASAN

Pendidikan Budi Pekerti di SMP

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan budi pekerti menunjukkan beberapa kelemahan serius baik dari substansi, metode, evaluasi maupun strategi pembelajaran. Zuriah (2007) menegaskan bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti di sekolah, untuk saat

ini memang sudah mengalami kemunduran. Data empiris menunjukkan bahwa para guru pun merasa enggan menegur anak didik yang berlaku tidak sopan di sekolah. Anak didik sering berperilaku tidak sopan terhadap guru, melecehkan sesama teman, bahkan ada sekolah yang tidak berani mengeluarkan anak didik yang sudah jelas-jelas menggunakan narkoba.

Hal ini diperparah oleh posisi serta kedudukan pendidikan budi pekerti yang sejajar dengan kurikulum muatan lokal dan sampai saat ini memang tidak berdiri sendiri Widodo (dalam Zuriah, 2007). Seharusnya pendidikan budi pekerti bersifat kontekstual, berwibawa, empiris, antisipatis, dan relevan dengan kebutuhan global, dan tidak bersifat doktrin, normatif, dan elitis.

Kontekstual di sini dalam arti bahwa pendidikan budi pekerti harus membumi, akrab, cocok, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas baik kebutuhan lokal, regional, maupun nasional dan global (Bafadal, dkk., 2003). Bermakna artinya pendidikan budi pekerti mampu menarik dan mengajak hati nurani peserta didik, bahwa pendidikan budi pekerti memang sangat penting dan merupakan kebutuhan riil bagi setiap peserta didik dalam mengarungi kehidupan, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kebermaknaan itu menjadi sangat penting agar siswa tidak terjebak pada programatisme berpikir, misalnya bahwa pelajaran yang penting itu ialah yang di UNAS kan, sementara yang lain tidak penting. Empiris dalam arti bahwa pendidikan budi pekerti perlu didasarkan dan ditumpukan pada kondisi-kondisi dan kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat luas, baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan masa yang akan datang. Antisipatif berarti bahwa pendidikan budi pekerti harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk menanggapi dan menjawab berbagai tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, relevan berarti bahwa perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pendidikan budi pekerti harus cocok, sesuai dan selaras dengan kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat luas. Oleh karena itu, pendidikan budi pekerti harus menggunakan paradigma baru atau pendekatan baru, yaitu pendekatan konstruktivistik. Konsekuensi logisnya pendidikan budi pekerti harus bermakna sesuai dengan konteks nyata dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan riil siswa.

Sungguh diperlukan model strategi pembelajaran pendidikan budi pekerti yang mampu menjawab banyak persoalan baik substansi, metode, maupun evaluasinya. Sementara itu pendidikan budi pekerti

memang sering diabaikan dan sekedar dititipkan pada mata pelajaran PKn. Visi dan misi PKn adalah mengembangkan dan membina manusia dan warga negara Indonesia seutuhnya yang loyal dan bangga atas jati ke-Indonesiaan-nya, tatanan kebangsaan dan kenegaraannya dan mampu menegakkan tatanan itu serta mampu pula mewariskan dan melestarikannya demi tagaknya kemerdekaan, kedaulatan dan integritas nasionalnya. Negara Indonesia bukan hanya membutuhkan SDM berkualitas (mandiri, cerdas, kreatif, dan unggul) saja melainkan juga berkepribadian, berwatak, dan bermoral Pancasila.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Pendidikan Budi Pekerti di SMP

Guru merupakan salah satu faktor penting yang mengalami kebingungan dalam menyinkapi muatan pendidikan budi pekerti yang harus dilaksanakan. Di satu sisi tugas-tugas kurikulum tidak banyak memuat materi yang mengarah pada pembentukan watak dan budi pekerti. Mengingat mata pelajaran PKn untuk SMP, materinya lebih mengarah ke demokrasi, HAM, hukum, atau kewarganegaraan. Di sisi lain, pendidikan budi pekerti sangat diperlukan. Di samping itu, kepedulian guru non PKn dan Agama masih sangat kurang karena mereka menganggap bukan tanggung jawabnya.

Faktor penghambat kedua adalah sistem sekolah yang berjalan sekarang ini masih belum efektif dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak. Sebenarnya, dengan berlakunya MBS peluang-peluang untuk membuat terobosan sangat terbuka. Namun demikian, itu sangat tergantung dari kepedulian *stake holders* sekolah dan kepala sekolah, dewan guru, maupun yang tidak kalah pentingnya ialah partisipasi yang cukup dari masyarakat melalui komite sekolah. Sesungguhnya, tekanan pada pendidikan budi pekerti tidak harus merombak sistem sekolah yang ada. Namun demikian, perlu adanya penekanan-penekanan tertentu pada sistem sekolah tersebut sehingga simpul-simpul nilai dapat ditanamkan, terungkap dan terbina secara berkesinambungan. Sistem sekolah selalu melibatkan aspek input, proses, dan output. Selama ini dasar pencarian siswa baru SMP selalu didasarkan pada nilai tes yang cenderung mengukur aspek kognitif dan intelegensi. Sedangkan faktor-faktor yang terkait dengan bakat, minat, dan kejiwaan tidak pernah diperhatikan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah kurikulum. Dalam kurikulum SMP saat ini pendidikan budi pekerti ataupun pendidikan nilai mempunyai posisi yang sangat marginal. Tidak ada pokok ba-

hasan khusus yang menempatkan pendidikan budi pekerti sebagai materi pembahasan. Permasalahan kurikulum di sini tidak hanya materi tetapi juga strategi pembelajaran dan evaluasinya. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa kurikulum dalam upaya penanaman budi pekerti dan nilai-nilai di sekolah. Dalam hal ini kemampuan guru untuk mengembangkan kurikulum jelas sangat signifikan pengaruhnya. Dengan kata lain harus ada kemampuan kuat dari guru bahwa pendidikan nilai sangat urgen.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan budi pekerti ialah sistem pembelajaran. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan budi pekerti berjalan sangat normatif. Hal ini selaras dengan pernyataan Parji (2002). Kenyataan kegagalan usaha pendidikan budi pekerti hanya disampaikan dalam usaha kognitif saja, sedangkan usaha lain tidak diperdulikan. Pendidikan budi pekerti seperti ini tidak selaras dengan dinamika psikologis dari perilaku moralitas.

Faktor eksternal adalah dukungan pemerintah, peran komite sekolah, dan orang tua. Dukungan pemerintah pada pendidikan budi pekerti akhir-akhir ini memang memprihatinkan. Bahkan menurut Bafadal dkk (2003), dukungan pemerintah ini meliputi bantuan dana tidak merata, relatif kecil, pola dukungan sering berubah-ubah dan ambivalensi antara Depdiknas dengan Departemen Agama pada pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.

Faktor Komite Sekolah juga patut dicermati dan perlu mendapat perhatian. Seiring dengan paradigma baru pendidikan partisipasi masyarakat dalam pendidikan sungguh sangat diharapkan. Berdasarkan SK Mendiknas 044/2002, peran dan fungsi Komite Sekolah sangat strategis, yakni sebagai pemberi pertimbangan, pemberi dukungan, pengontrol, dan mediator antara pemerintah dan masyarakat. Uraian hasil survei Parji (2005) menunjukkan bahwa 75% Komite Sekolah masih belum menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal. Sebagaimana besar Komite Sekolah masih seperti BP yang lebih berorientasi pada pengumpulan dana. Hal demikian juga membawa implikasi pada pembelajaran budi pekerti. Banyak orang tua yang berpendapat seolah-olah semua keberhasilan anak didik hanya ditentukan oleh guru di sekolah. Sehingga seringkali guru, terutama guru PKn dan agama, menjadi tumpuan kesalahan.

Masalah Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti

Masalah-masalah yang terkait dengan strategi pembelajaran pendidikan budi pekerti, sebagai be-

rikut. *Pertama*, kemampuan guru dalam menjabarkan isi kurikulum bahan ajar.

Dalam pembelajaran yang orientasi afektif dan *valu*nya menonjol, menuntut kemampuan guru untuk mengembangkan materi ajar yang tidak hanya berasal dari buku-buku teks. Akbar, dkk. (2003) mengatakan kebiasaan guru yang *text book oriented* yang telah berjalan puluhan tahun ketika menjabarkan isi kurikulum menjadi bahan ajar, bahkan secara jelas dinyatakan "kurikulum sama dengan buku teks" menjadikan guru seperti "kelabakan" ketika harus mengajar yang hanya disugahi dengan kompetensi dan standar yang harus dicapai tanpa ketersediaan buku teks.

Akbar dkk. (2003) merekomendasikan perlunya pengembangan materi-materi pembelajaran dari dunia simbolis (seperti dari ritual-ritual keagamaan, upacara-upacara adat, bahasa isyarat, dan sistem simbol lainnya); dunia empiris (dalam ilmu pengetahuan yang mengandalkan pengalaman), dunia estetis (dalam seni); dunia etis (makna-makna atau pilihan-pilihan moral), dunia sinotis (pengalaman-pengalaman relational atau pengetahuan dan pengalaman hidup yang bersifat pribadi), dan dunia sinopsis (seperti dalam dunia agama, filsafat, sejarah, dan lain-lain). Pengembangan materi dari berbagai macam dunia makna (nilai) tersebut tidak sekedar agar siswa berpengetahuan luas tetapi juga dapat dikembangkan perasaannya dan kemauannya agar dapat menghadapi berbagai tantangan hidup), bertahan hidup (*survive*), dan menghidupi (berperan dan mempengaruhi) dunianya secara lebih bermakna.

Oleh karena itu, kebiasaan terlalu mengandalkan dan bergantung pada buku teks ini harus diubah melalui pembiasaan-pembiasaan (budaya) yang lebih berorientasi pada observasi, penulisan karya ilmiah, maupun budaya riset (meneliti) di kalangan guru walaupun dalam tingkat sederhana

Kedua, ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar. Dari hasil kajian Tim Peneliti, ketergantungan guru dan siswa pada buku teks masih sangat tinggi. Hampir tidak ada guru yang mengembangkan sumber belajar melalui buku atau modul yang diciptakan guru itu sendiri. budaya peneliti buku di sekolah juga masih sangat kurang. Hal demikian sebenarnya dapat disiasati dengan pemanfaatan sumber belajar seperti koran, majalah, dan sumber lain seperti internet dan lainnya.

Ketiga, Model Interaksi Guru dan Siswa. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa metode ceramah masih menempati rangking pertama dalam proses pembelajaran. Padahal, model interaksi demikian seringkali membuat proses pembelajaran men-

jadi ” kering ” dan ” kurang bermakna ”. Dominasi guru masih terlihat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun proses-proses pengambilan keputusan edukatif yang sesungguhnya bisa mengedepankan partisipasi siswa.

Keempat, pemanfaatan potensi alam sekitar. Proses Pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivistik sangat memberi tempat pada pemanfaatan potensi alam sekitar. Dalam hal pendidikan budi pekerti banyak sekali contoh-contoh kehidupan yang dapat dipakai sebagai acuan dan bahan analisis dalam pembelajaran. Simpul-simpul kehidupan seperti keteladanan, toleransi, kerjasama sosial, dan tanggung jawab sosial menjadi amat penting dalam pembelajaran budi pekerti. Akbar (2003) mengungkapkan temuannya bahwa kesadaran untuk memanfaatkan potensi alam sekitar masih relatif rendah.

Kelima, kesulitan siswa dalam memahami isi pelajaran. Semakin siswa merasa sulit menerima dan memahami isi pelajaran menjadikan motivasi belajar siswa rendah karena mereka tidak merasa membutuhkan apa yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain ”pesan tidak sampai”. Menurut Haqq (1998) guru atau fasilitator bukanlah orang yang mengirim pengetahuan kepada peserta didik melainkan seorang pembimbing, fasilitator, dan penyelidik pendamping yang membantu individu untuk mempertanyakan, menantang, dan menginformasikan ide, opini, dan kesimpulan mereka.

Keenam, kesulitan guru dalam menyimpulkan isi. Banyak guru yang masih belum komunikatif dalam menyampaikan pesan pembelajaran. Umumnya proses pembelajaran berjalan sangat normatif. Padahal komunikasi merupakan kunci keberhasilan pembelajaran. Widodo (2004) mengatakan memahami komunikasi menjadi kunci penting bagi para guru dan dosen, atau siapa saja yang berkompeten dalam *transfer of meaning/knowledge*. Di samping itu, tumpang tindihnya kurikulum memang ikut mendorong terjadinya pemahaman yang biasa akan posisi pendidikan budi pekerti atau nilai.

Ketujuh, media pembelajaran. Di antara variabel-variabel pembelajaran, media pembelajaran merupakan variabel sangat penting yang sebenarnya dapat dimodifikasi oleh guru. Tanpa media yang memadai sulit diharapkan terjadi proses pembelajaran yang berkualitas. Para peserta didik akan terjebak pada verbalisme tanpa memahami situasi konkrit yang sesungguhnya. Temuan Akbar, dkk. (2003) memperkuat hasil penelitian ini. Media pembelajaran PKn yang ada dan sering digunakan oleh para guru dalam pembelajaran masih didominasi oleh media gambar,

buku pelajaran, dan lembar kerja siswa, dan sedikit peristiwa yang ada di sekitar sekolah, itupun jumlahnya masih sangat terbatas.

Kemampuan mengembangkan media pembelajaran oleh guru juga dipandang masih rendah. Terbukti dengan terbatasnya media yang dipergunakan oleh guru. Hal demikian juga ditemukan dalam penelitian ini, akibatnya proses pembelajaran berjalan kurang menarik, cenderung membosankan dan tentu saja kurang bermakna.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti di SMP dapat dinyatakan tidak berhasil. Ketidakterhasilan ini dirasakan oleh semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung di dalam penyelenggaraan pembelajaran yaitu siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, komite sekolah dan orang tua siswa atau masyarakat dalam arti luas, walaupun masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda tentang bentuk ketidakberhasilan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti. Penelitian juga menemukan bahwa ketidakberhasilan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti disebabkan oleh sejumlah faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor penghambat yang bersumber pada guru, sistem sekolah, kurikulum, sistem pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang dimiliki sekolah. Banyak guru terjebak dalam tugas mengajar sebagai rutinitas belaka, tanpa mampu membuat inovasi-inovasi yang akan membuat penanaman nilai-nilai kepada siswa menjadi lebih efektif. Sebab lain, yang terkait dengan guru, adalah persepsi salah tentang Pendidikan Budi Pekerti yang lebih cenderung disikapi sebagai materi akademik dari Pendidikan Kewarganegaraan. Sistem sekolah, kurikulum, sistem pembelajaran dan fasilitas yang dimiliki sekolah juga kurang mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti yang efektif.

Secara lebih spesifik pembelajaran Budi Pekerti mengandung berbagai kelemahan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, antara lain terdiri dari (1) rendahnya kemampuan guru menjabarkan kurikulum menjadi bahan ajar, (2) terbatasnya sumber belajar yang dapat digunakan, (3) model interaksi guru-siswa di kelas yang masih cenderung searah, (4) kemampuan pemanfaatan lingkungan yang masih rendah, dan (5) motivasi belajar siswa yang

juga rendah, yang antara lain disebabkan materi ajar yang sukar dipahami dan kurang menarik.

Faktor penghambat eksternal yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah dukungan pemerintah yang lemah, dengan konsep yang salah pula. Dalam hal ini pemerintah lebih berkepentingan dengan penyebaran informasi yang terkait dengan peraturan-peraturan. Selain itu, dukungan dari komite sekolah dan orang tua juga dirasakan masih sangat lemah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdal-Haqq, I. 1998. Constructivism in Teacher Education: Consideration for Those Who Would Link Practice to Theory. *ERIC Digest*, (Online), (http://www.cricfacility.net/databases/ERIC_Digest/ diakses tanggal 4 Juli 2004).
- Akbar, S., Margono, Mukhadis, A., Budiono, A., Samawi, A., Ibnu, S., Nur Syam, A. & Iriyadi. 2003. *Kajian Kurikulum dan Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*. Malang: Wineka Media.
- Anwar. 2006. Penggunaan Peta Konsep melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Proses, Hasil Belajar, dan Respons pada Konsep Ekosistem. *Jurnal Penelitian Kependidikan*, 16 (2): 217-244.
- Bafadal, I., Saryono, J., Kustono, J. & Mukhadis, A. 2003. *Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup*. Malang: Wineka Media.
- Bandura, A. 2001. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Annual Review of Psychology*, (Online), (<http://www.findarticles.com/> diakses tanggal 18 Januari 2004).
- Bandura, A. 2002. Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency. *Journal of Moral Education*, 31: 101-109.
- Bransford, J.D., Brown, A.L. & Cocking, R.R. (Eds.). 1999. *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School*. Washington, D.C.: National Academy Press.
- Butler, D.L. 1998. The Strategic Content Learning Approach to Promoting Self Regulated Learning: A Report of Three Studies. *Journal of Educational Psychology*, 90 (4): 682-697.
- Depdiknas. 2002. *Pedoman Penyelenggaraan Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Dirjen Diklusepa Depdiknas.
- Depdiknas. 2003a. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Prasekolah, Dasar dan Menengah: Ketentuan umum*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Depdiknas. 2003b. *Pedoman Pendidikan Budi Pekerti: Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Durkin, K. 1995. *Developmental Social Psychology: From Infancy to Old Age*. Cambridge: Blackwell publishers, Inc.
- Elliot, S.N., Kratochwill, T.R., Littlefield, J. & Travers, J.F. 1999. *Educational Psychology: Effective Teaching, Effective Learning*. Madison: Brown & Benchmark Publishers.
- Fenwick, T.J. 2001. *Experiential Learning: A Theoretical Critique from Five Perspectives*. Columbus: Ohio State University.
- Koentjara. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Diklat Perkuliahan S2*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- McCown, R., Driscoll, M. & Roop, P.G. 1996. *Educational Psychology: A Learning-Centered Approach to Classroom Practice*. Boston: Allyn & Bacon.
- Mestre, J.P. 2002. *Cognitive Aspects of Learning and Teaching Science*. Washington, D.C.: National Science Foundation.
- Michener, H.A. & DeLamater, J.D. 1999. *Social Psychology*. Fort Worth: Harcourt Brance College Publishers.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Resdakarya.
- Omrod, J.E. 2003. *Educational Psychology: Developing Learners*. Upper Saddle River: Merrill Prentice Hall.
- Pardjono. 2002. Active Learning: The Dewey, Piaget, Vygotsky, and Constructivist Theory Perspectives. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9 (3): 163-178.
- Parji. 2002. Strategi Pembelajaran Pendidikan Moral pada Era Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9 (2): 97-107.
- Parji. 2005. Peningkatan Profesionalisme Guru melalui Perubahan Pola Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan IKIP PGRI Madiun*, 11 (2): 142-150.
- Sihkabuden. 2004. Pengembangan Bahan Pembelajaran Pendidikan Moral dengan Metode Diskusi Dilema Moral pada Siswa SMU/SMK. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 11 (2): 130-140.

Saran

Di masa depan diharapkan dapat dikembangkan konsep, pemahaman, penyikapan dan pendekatan pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti yang lebih kondusif dan menjanjikan bagi keberhasilan upaya menanamkan nilai-nilai kepada siswa, dengan pendekatan yang lebih bersifat konstruktivistik, *student-centered*, dan kontekstual, serta dengan dukungan penuh dari semua *stake-holders* terkait.

- Wagiran. 2006. Meningkatkan Keaktifan Mahasiswa dan Reduksi Miskonsepsi melalui Pembelajaran Konstruktivistik Model Kooperatif Berbantuan Modul. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13 (1): 25-32.
- Zuriah, N. 2007. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.